



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013-2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017;
- b. bahwa penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Petetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 - 2025 (lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013-2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Lubuklinggau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Wakil Walikota.

6. Satuan..... ..

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Setiap SKPD wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- 1) Naskah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- 2) Penetapan Indikator Kinerja SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis Organisasi, dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan;
 - b. indikator Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - c. bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan , tugas pokok dan fungsi serta peran lainnya;
 - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - e. kebutuhan data statistik pemerintah;
- 3) Pemilihan indikator kinerja utama berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. spesifik;

b. dapat.....

- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB III
PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

- 1) Indikator kinerja utama Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017 digunakan untuk :
 - a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen Penetapan Kinerja;
 - d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. evaluasi kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dan evaluasi kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau diberikan tugas:
 - a. melakukan pengendalian dan pemantauan atas rencana kerja program SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - b. melakukan evaluasi atas capaian Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dan setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau setiap tahun;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing kegiatan pada SKPD secara triwulanan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2008-2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7.....

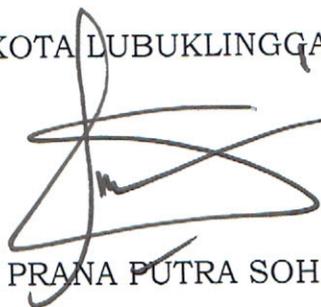
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 26 OKTOBER 2013

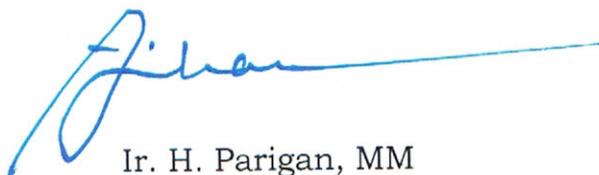
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 26 OKTOBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



Ir. H. Parigan, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU

ASRON ERWADI, SH, M.Hum
PEMBINA
NIP.19660806 198803 1 004

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR .49

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 49 TAHUN 2013
 TENTANG :
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH
 KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013-2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
1.1.1 Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan	Angka Harapan hidup	Tahun	Dinas Kesehatan	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup pada satu tahun tertentu}} \times 1.000$
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama}} \times 100.000$
	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup (MDG's)	Per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup pada satu tahun tertentu di daerah tertentu}} \times 100\%$
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama}} \times 100\%$	
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin di satu wilayah pada kurun waktu tertentu yang persalinannya memperoleh pertolongan dari tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di satu wilayah yang sama pada kurun waktu yang sama}} \times 100$	

Dasar Data	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	%	Dinas Kesehatan	<p>Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan persalinan nifas sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu</p> $\frac{\text{Jumlah Ibu Nifas di satu wilayah yang sama pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dgn komplikasi yg ada}} \times 100\%$
	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah neonatus dgn komplikasi yg tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dgn komplikasi yg ada}} \times 100$
	Cakupan Kunjungan Bayi	%	Dinas Kesehatan	<p>Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu</p> $\frac{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja}}{\text{Jumlah kurun waktu yg sama}} \times 100\%$
	Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Puskesmas		Dinas Kesehatan	Menunjukkan Tingkat kepuasan Masyarakat untuk pelayanan kesehatan Puskesmas melalui survey
	Cakupan kunjungan rawat jalan puskesmas	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memanfaatkan puskesmas}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
	Prevalensi balita gizi kurang (MDG's)	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Banyaknya balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$
	Persentase balita gizi buruk	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$
	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan.	%	Dinas Kesehatan	<p>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu</p> $\frac{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama}}{\text{Jumlah balita gizi buruk}} \times 100$
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	%	Dinas Kesehatan	<p>Jumlah anak usia 6 - 24 bln keluarga miskin yg mendapat Makanan Pendamping - ASI</p> $\frac{\text{Jumlah seluruh anak usia 6 - 24 bln keluarga miskin}}{\text{Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja}} \times 100\%$
	Cakupan pelayanan anak balita.	%	Dinas Kesehatan	<p>Jml anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pd waktu tertentu</p> $\frac{\text{Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja}}{\text{Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja}} \times 100\%$

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah anak berumur } < 5 \text{ tahun yang meninggal di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien miskin di sarkes strata 1}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin}} \times 100\%$
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien miskin di sarkes strata 2 dan strata 3}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin}} \times 100\%$
	Ketersediaan empat dokter spesialis dasar pegawai tetap Rumah Sakit	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah dokter spesialis sebagai pegawai tetap RS}}{\text{Jumlah dokter spesialis yang seharusnya ada}} \times 100\%$
	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk		Dinas Kesehatan	
	- Rasio dokter spesialis terhadap 100.000 Penduduk	Per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di wilayah tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah yang sama}} \times 100.000$
	- Rasio dokter Umum terhadap 100.000 Penduduk	Per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan di wilayah tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah yang sama}} \times 100.000$
	- Rasio dokter Gigi terhadap 100.000 Penduduk	Per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan di wilayah tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah yang sama}} \times 100.000$
	- Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk	Per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah bidan yang memberikan pelayanan kesehatan di wilayah tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah yang sama}} \times 100.000$
	Rasio puskesmas per 30.000 penduduk	Per 30.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah puskesmas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 30.000$
	Rasio Pustu per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Pustu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
	Rasio Posyandu terhadap balita	Per 1.000 balita	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Posyandu}}{\text{Jumlah balita}} \times 1.000$
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Pelayanan gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah Rumah Sakit kabupaten/kota}} \times 100$

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
	Rasio pasien yang tertangani melalui tindakan medis	Per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap yang terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$
	- Pasien rawat inap	Per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat jalan yang terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$
	- Pasien rawat jalan	Per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien UGD yang terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$
	- Pasien UGD	Per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Menunjukkan tingkat kepuasan pelayanan Rumah Sakit
	Tingkat Kepuasan Pelayanan RS	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien GAKIN yang dilayani rumah sakit}}{\text{Jumlah seluruh pasien GAKIN yang datang ke rumah sakit}} \times 100$
	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	%	Dinas Kesehatan	
	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit.	Per 1.000 penduduk usia > 15 tahun	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan}}{\text{Jumlah Penduduk usia dibawah 15 tahun}} \times 1.000$
	- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pd kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yg sama}} \times 100$
	- Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani (SPM)	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun}} \times 100$
	- presentase penemuan pasien baru TB BTA positif TB BTA (+) (SPM & MDC's)	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama}} \times 100$
	- Penderita DBD yang ditangani	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita diare yang datang dan ditangani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah tertentu dalam waktu yg sama}} \times 100$
	- Penderita Diare yang ditangani	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita diare x jumlah penduduk}}{100}$ (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)
1.1.2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyebaran lingkungan			

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
	Angka kejadian Malaria per 100.000 penduduk (AMJ)/(APJ) (MDG's)	per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$
	Cakupan imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 11 bulan yang diimunisasi}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 11 bulan}} \times 100$
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah desa /kelurahan UCI}}{\text{Jumlah seluruh desa/kelurahan}} \times 100\%$
	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (MDG's)	Per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita HIV/AIDS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$
	Tingkat kematian akibat Malaria (MDG's)	Per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Banyaknya kematian karena malaria pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pada pertengahan tahun}} \times 100.000$
	Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun) (MDG's)	Per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Banyaknya kasus penderita TBC (Baru dan Lama)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$
	Angka kematian TBC (AKTBC)	Per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Banyaknya kematian karena TBC}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$
	Persentase Tempat Pengolahan Makanan dibina/diawasi	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Tempat Pengolahan Makanan yang diawasi}}{\text{Jumlah seluruh tempat pengolahan makanan}} \times 100$
	Persentase TTUI (Tempat-Tempat Umum Institusi) dibina/diawasi	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat}}{\text{Jumlah Rumah Tangga yang dipantau/di survey}} \times 100$
	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penduduk tahun n - 1}}{\text{Jumlah penduduk tahun n - 1}} \times 100$
	Laju pertumbuhan penduduk	%	Dinas Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang masuk}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
	Rasio perpindahan penduduk masuk (imigrasi)	%	Dinas Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang keluar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
	Rasio perpindahan penduduk keluar (emigrasi)	%	Dinas Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang keluar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka kematian kasar (Crude Death Rate)	Per 1.000 penduduk	Dinas Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah kematian (death) pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun tertentu}} \times 1.000$

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang merata	Rata-rata jumlah anak per keluarga		Dinas Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$
	Rasio akseptor KB	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$
	Jumlah Prevalensi peserta KB		Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Menunjukkan jumlah anggota KB baru tahun n
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (SPM)	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah PUS yang usia dibawah 20 tahun}}{\text{Jumlah PUS yang usia isterinya 15 - 45 tahun}} \times 100$
	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Kelurahan (SPM)	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah kelurahan}}{\text{Jumlah PLKB/PKB}} \times 100$
	Cakupan peserta KB aktif	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$
	Cakupan informasi data mikro keluarga	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Rekap data mikro keluarga}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100$
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100$
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (SPM)	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah anggota UPPKS yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota UPPKS yang PUS}} \times 100$
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (SPM)	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah anggota BKB yang ber-KB}}{\text{Jumlah PUS anggota BKB}} \times 100$
Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga	Prosentase organisasi olahraga yang aktif	%	Dinas Pemuda dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah organisasi olahraga yang aktif}}{\text{Jumlah organisasi olahraga}} \times 100$
	Jumlah atlet olahraga yang dibina	Atlet	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jumlah atlet yang dibina oleh pemerintah kota
	Prosentase cabang olahraga yang dibina	%	Dinas Pemuda dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah cabang olahraga}} \times 100$
	Jumlah kegiatan/event olahraga	Kali/kegiatan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Menunjukkan jumlah kegiatan/event olahraga yang diselenggarakan
	Jumlah Lapangan Olahraga per 1.000 penduduk	Per 1.000 penduduk	Dinas Pemuda dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK, RA dan Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 - 6 tahun}} \times 100$
	Angka Melek Huruf	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun}} \times 100$
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	Tahun	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7 - 12 tahun di jenjang SD, MI, Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun}} \times 100$
	Angka Partisipasi Murni SD/SDLB/MI/PAKET A	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 - 15 tahun di jenjang SMP, MTs, Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun}} \times 100$
	Angka Partisipasi Murni SMP/SMP LB/MTs/PAKET B	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16 - 18 tahun di jenjang SMA, MA, Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun}} \times 100$
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah murid usia (7 s.d 12) thn} + \text{(13 s.d 15) thn}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn} + \text{(13 s.d 15) thn}} \times 1.000$
	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	Per 1.000	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah murid usia 16-19 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 16-19 thn}} \times 1.000$
	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah	Per 1.000	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah murid putus sekolah di jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah siswa di tingkat pendidikan SD / MI /Paket A}} \times 100$
	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah murid putus sekolah di jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah siswa di tingkat pendidikan SMP / MTs /Paket B}} \times 100$
	Angka Putus Sekolah SMP/SMP LB/MTs	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah murid putus sekolah di jenjang SMA/MA/Paket C}}{\text{Jumlah siswa di tingkat pendidikan SMA / MA /Paket C}} \times 100$
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pd tahun sebelumnya}} \times 100$
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTSpd tahun sebelumnya}} \times 100$
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun sebelumnya}} \times 100$
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100$	
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	Dinas Pendidikan		

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100$
	Rasio ketersediaan sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah	Per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7-12)thn}} \times 10.000$
	Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah	Per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (13-15)thn}} \times 10.000$
	Rasio ketersediaan sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah	Per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SMA/MA/SMK)}}{\text{Jumlah penduduk usia (16-18)thn}} \times 10.000$
	Prosentase Ruang Kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah Ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Ruang Kelas SD}} \times 100$
	Prosentase Ruang Kelas pendidikan SMP/SMPLB/MTs kondisi bangunan baik	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah Ruang kelas SMP/SMPLB/MTs dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Ruang Kelas SMP/SMPLB/MTs}} \times 100$
	Prosentase Ruang Kelas pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah Ruang kelas SMA/SMK/MA dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK/MA}} \times 100$
	Rasio guru SD/MI terhadap murid SD/MI	Per 10.000 murid SD/MI	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah Guru SD/MI}}{\text{Jumlah Murid SD/MI}} \times 10.000$
	Rasio guru SMP/SMPLB/MTs terhadap murid SMP/SMPLB/MTs	Per 10.000 murid SMP/MTs	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah Guru SMP/SMPLB/MTs}}{\text{Jumlah Murid SMP/SMPLB/MTs}} \times 10.000$
	Rasio guru SMA/MA/SMK terhadap murid SMA/MA/SMK	Per 10.000 murid SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)}}{\text{Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)}} \times 10.000$
Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah guru berjasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$
	Jumlah perpustakaan daerah	Buah	Kantor Perpustakaan Daerah	Jumlah perpustakaan yang beroperasi di wilayah kota baik milik penda maupun non penda
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	Kantor Perpustakaan Daerah	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani}} \times 100$
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	Kantor Perpustakaan Daerah	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
	Jumlah peminjam buku di perpustakaan	Peminjam	Kantor Perpustakaan Daerah	Jumlah peminjam buku di perpustakaan daerah
	Prosentase sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi baik	%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana peribadatan}} \times 100$
	Jumlah kegiatan keagamaan	Kegiatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan
Terwujudnya masyarakat yang religius dan beretika	%	Organisasi sosial keagamaan yang aktif dan produktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi sosial keagamaan yang aktif}}{\text{Jumlah organisasi sosial keagamaan}} \times 100$	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Berkembangnya nilai-nilai budaya	Konflik antar pemeluk Agama	%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik antar pemeluk agama yang terselesaikan}}{\text{Jumlah konflik antar pemeluk agama}} \times 100$
	Rasio tempat peribadatan per 1000 penduduk	Per 1.000 penduduk	Bagian Kesejahteraan Rakyat	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana peribadatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$
				<p>Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyuluhan substansial maupun teknikal; 2. pemberian bantuan; 3. bimbingan organisasi; 4. kaderisasi; 5. promosi; 6. pemberian dan pendokumentasian; dan 7. kritik seni.
	Cakupan fasilitasi seni budaya (SPM)	%	Dinas Pariwisata	<p>Wujud gelar seni antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pertunjukan; 2. pameran; 3. festival; dan 4. lomba.
	Cakupan pertunjukan seni budaya (SPM)	%	Dinas Pariwisata	<p>Kegiatan yang bersifat kajian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. seminar; 2. sarasehan; 3. diskusi*; 4. bengkel seni (workshop)*; 5. penyerapan narasumber; 6. studi kepustakaan; 7. penggalan; 8. eksperimentasi; 9. rekonstruksi; 10. revitalisasi; 11. konservasi; 12. studi banding; 13. inventarisasi*; 14. dokumentasi*; dan 15. pengemasan bahan kajian.
	Cakupan kajian seni (SPM)	%	Dinas Pariwisata	
	Jumlah tempat pertunjukan seni	Buah	Dinas Pariwisata	<p>Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempunyai standar kualitas	Jumlah lembaga pendidikan dan latihan yang tersertifikasi	buah	Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan dan latihan yang tersertifikasi
	Jumlah lulusan SMK dan lembaga Pelatihan Ketenagakerjaan yang mempunyai standar kualitas	Orang / lembaga	Dinas Pendidikan	Jumlah lulusan SMK dan lembaga Pelatihan Ketenagakerjaan yang mempunyai standar kualitas
Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah Usaha Mikro Kecil	%	Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100$
	Jumlah tenaga kerja UMKM			Jumlah tenaga kerja UMKM
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar	$\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal}} \times 100$
	Jumlah UMKM menerima kredit usaha		Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar	Jumlah UMKM yang menerima kredit usaha
	Koperasi yang dibina	%	Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang dibina}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100$
	Koperasi yang aktif	%	Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang aktif}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100$
Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	Tingkat penyelesaian masalah perlindungan konsumen	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan perlindungan konsumen yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen}} \times 100$
	Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang
	Jumlah pasar modern	buah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pasar modern
	Jumlah pasar tradisional	buah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah pasar tradisional
	Jumlah SiUP yang diterbitkan	izin	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah SiUP yang diterbitkan
	Konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan	Rp per kapita	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah total konsumsi bahan pangan (Rp)}}{\text{Jumlah penduduk}}$
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal}} \times 100$
	Jumlah pedagang/usaha informal		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah pedagang/usaha informal
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Jumlah IKM yang dibina	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Industri Kecil Menengah yang dibina}}{\text{Jumlah Industri Kecil Menengah}} \times 100$
	Prosentase pertumbuhan Industri	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun (n)} - \text{Jumlah Industri tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Industri tahun (n-1)}} \times 100$

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Terpenuhnya ketersediaan bahan pangan masyarakat	Jumlah Izin Usaha Industri yang diterbitkan	Izin	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Izin Usaha Industri yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Industri}} \times 100$
	Rasio Tenaga Kerja Industri terhadap Jumlah Industri	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Industri}}{\text{Jumlah Industri yang menggunakan teknologi}} \times 100$
	Prosentase yang menggunakan teknologi	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Industri yang menggunakan teknologi}}{\text{Jumlah Industri}} \times 100$
	Ketersediaan pangan utama		Kantor Ketahanan Pangan	
	Produktivitas padi	Ton/ha	Kantor Ketahanan Pangan	$\frac{\text{Produksi tanaman padi (ton)}}{\text{Luas Areal tanaman padi (ha)}}$
	Produktivitas jagung	Ton/ha	Kantor Ketahanan Pangan	$\frac{\text{Produksi tanaman jagung (ton)}}{\text{Luas Areal tanaman jagung (ha)}}$
	Produktivitas kedelai	Ton/ha	Kantor Ketahanan Pangan	$\frac{\text{Produksi tanaman kedelai (ton)}}{\text{Luas Areal tanaman kedelai (ha)}}$
	Produktivitas tanaman hortikultura		Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	$\frac{\text{Produksi tanaman durian (ton)}}{\text{Luas Areal tanaman durian (ha)}}$
	-Durian	Ton/ha	Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	$\frac{\text{Produksi tanaman mangga (ton)}}{\text{Luas Areal tanaman mangga (ha)}}$
	-Mangga	Ton/ha	Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	$\frac{\text{Produksi tanaman mangga (ha)}}{\text{Luas Areal tanaman mangga (ha)}}$
Produktivitas tanaman perkebunan		Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	$\frac{\text{Produksi tanaman karet (ton)}}{\text{Luas Areal tanaman karet (ha)}}$	
-Karet	Ton/ha	Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	$\frac{\text{Produksi tanaman kopi (ton)}}{\text{Luas Areal tanaman kopi (ha)}}$	
-Kopi	Ton/ha	Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	$\frac{\text{Produksi tanaman kopi (ha)}}{\text{Luas Areal tanaman kopi (ha)}}$	
Produktivitas tanaman Biofarmaka		Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	$\frac{\text{Produksi tanaman kunyit (ton)}}{\text{Luas Areal tanaman kunyit (ha)}}$	
-Kunyit	Ton/ha	Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	$\frac{\text{Produksi tanaman kunyit (ton)}}{\text{Luas Areal tanaman kunyit (ha)}}$	
Pendapatan petani padi per tahun		Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	$\frac{(\text{Produksi beras per Ha}) \times (\text{Harga beras}) - (\text{Biaya Produksi Per Ha})}{\text{Rasio Petani Padi terhadap Luas Lahan}}$	
Cakupan bina kelompok tani	%	Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani yang dibina}}{\text{Jumlah Kelompok Tani}} \times 100$	
Tingkat konsumsi produk peternakan	Kg per kapita	Dinas Perikanan dan Peternakan	$\frac{\text{Jumlah konsumsi hasil peternakan (Kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	
Prosentase peternak yang menggunakan teknologi	%	Dinas Perikanan dan Peternakan	$\frac{\text{Jumlah peternak yang menggunakan teknologi}}{\text{Jumlah peternak}} \times 100$	
Jumlah peternak	Ton	Dinas Perikanan dan Peternakan	Jumlah peternak	
Produksi daging	Ton	Dinas Perikanan dan Peternakan	Jumlah produksi daging	
Produksi telur	Ton	Dinas Perikanan dan Peternakan	Jumlah produksi telur	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Populasi ternak	Ekor	Dinas Perikanan dan Peternakan	Jumlah populasi ternak
	Prosentase penemuan kasus penyakit ternak yang ditangani	%	Dinas Perikanan dan Peternakan	$\frac{\text{Jumlah kasus penyakit ternak yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus penyakit ternak}} \times 100$
	Tingkat konsumsi ikan	Kg per kapita	Dinas Perikanan dan Peternakan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Jumlah penduduk}}$
	Produksi hasil perikanan	Ton	Dinas Perikanan dan Peternakan	Jumlah produksi hasil perikanan
	Rasio Jaringan Irigasi		Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$
	Luas irigasi dalam kondisi baik	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100$
Terciptanya kesempatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	$\frac{\text{Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan}}{\text{Jumlah destinasi wisata yang dimiliki oleh daerah}} \times 100$
	Jumlah wisatawan		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
	Jumlah SDM dan pelaku usaha pariwisata		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah SDM dan pelaku usaha pariwisata
	Rasio penduduk yang bekerja		Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Penduduk kerja}} \times 100$
	Partisipasi Angkatan Kerja	%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$
	Tingkat pengangguran terbuka	%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100$
	Pencari Kerja Yang ditempatkan	%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100$
	Tingkat pengawasan ketenagakerjaan	%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang diperiksa}}{\text{Jumlah perusahaan yang terdaftar}} \times 100$
	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan}} \times 100$
Terwujudnya peningkatan investasi	Prosentase panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalam kondisi baik	%	Dinas Tenaga Kerja	$\frac{\text{panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK}}{\text{panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalam kondisi baik}}$
	Rasio Elektrifikasi		Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Jumlah Pelanggan PLN}}{\text{Jumlah Perumahan}} \times 100$
	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 penduduk	Badan Kepegawaian Daerah	$\frac{\text{Jumlah lulusan S1/S2/S3}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
	Angka Ketergantungan	%	Badan Kepegawaian Daerah	$\frac{\text{Penduduk usia <15 th + usia >64}}{\text{Penduduk usia 15-64}} \times 100$
	Tingkat ketepatan waktu layanan Perizinan	%	Kantor Pelayanan Perizinan	$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan paling lama 2 (dua) hari}}{\text{Jumlah permohonan izin yang persyaratannya dinyatakan lengkap}} \times 100$

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Terimplementasikannya SPIPISE (SPM)	%	Kantor Pelayanan Perizinan	$\frac{\text{Jumlah jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE}}{4 \text{ jenis pelayanan perizinan sesuai dengan SPM}} \times 100$
	Prosentase jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDKPM (Perangkat Daerah Kota Penanaman Modal)	%	Kantor Pelayanan Perizinan	$\frac{\text{Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDKPM}}{6 \text{ jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SPM}} \times 100$
	Tingkat layanan penerbitan IUK (SPM)	%	Kantor Pelayanan Perizinan	$\frac{\text{Jumlah Pemohon IUK yang terlayani (diterbitkan IUK nya) paling lama 10 hari kerja}}{\text{Jumlah Seluruh Pemohon IUK yang persyaratannya dinyatakan lengkap}} \times 100$
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		Kantor Penanaman Modal Daerah	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		Kantor Penanaman Modal Daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
	Daya Serap Tenaga Kerja		Kantor Penanaman Modal Daerah	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$
	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (SPM)	Keg	Kantor Penanaman Modal Daerah	Jumlah sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$
	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Dana Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat}}{\text{Jumlah PPK aktif}} \times 100\%$
	PKK aktif	%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah PPK aktif}}{\text{Jumlah PPK}} \times 100\%$
Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah PPK	
Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Prosentase keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural pemerintah daerah	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah pejabat perempuan yang menduduki jabatan struktural dipemerintah daerah}}{\text{Jumlah jabatan struktural di pemerintah daerah}} \times 100$
	Proporsi keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah anggota DPRD perempuan}}{\text{Jumlah anggota DPRD}} \times 100$
	Jumlah organisasi wanita aktif	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah organisasi wanita yang aktif}}{\text{Jumlah organisasi wanita}} \times 100$
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100$

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya penanganan masalah sosial kemasyarakatan	Rasio KDRT	%	Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak}} \times 100$
	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah WKSBM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah WKSBM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100$
	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pember-dayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya}} \times 100$
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial}} \times 100$
	Persentase Eks Napi, PSK, Gelandangan dan Pengemis yang direhabilitasi	%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Eks Napi, PSK, Gelandangan dan Pengemis yang direhabilitasi}}{\text{Eks Napi, PSK, Gelandangan dan Pengemis}} \times 100$
	Persentase anjal, penca, lansia, orang tertantar yang mendapatkan pelayanan psikososial, pendampingan dan bantuan sosial	%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah anjal, penca, lansia, orang tertantar yang mendapatkan pelayanan psikososial, pendampingan dan bantuan sosial}}{\text{Jumlah anjal, penca, lansia, orang tertantar yang seharusnya mendapatkan pelayanan psikososial, pendampingan dan bantuan sosial}} \times 100$
	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100$
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100$
	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap}}{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap}} \times 100$

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS skala Kabupaten/kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100$
	Prosentase anak terlantar yang mendapatkan jaminan sosial	%	Dinas Sosial	$\frac{\text{anak terlantar yang mendapatkan jaminan sosial}}{\text{Jumlah anak terlantar}} \times 100$
	Jumlah penerima layanan berobat gratis (kartu sehat)	orang	Dinas Kesehatan	Jumlah masyarakat yang menerima layanan berobat gratis (Kartu Linggau Bisa Sehat)
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM)	%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{\text{Jumlah Luas WMM Kabupaten/kota}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran Kabupaten/kota}} \times 100$
	Jumlah siswa penerima beasiswa Miskin (kartu pintar)	orang	Dinas Pendidikan	Jumlah siswa yang menerima layanan pendidikan (Kartu Linggau Bisa Pintar)
	Prosentase RTS penerima Raskin	%	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga sasaran yang menerima bantuan Raskin}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Miskin}} \times 100$
				$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah organisasi pemuda}} \times 100$
	Prosentase organisasi pemuda yang aktif	%	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
		Keg	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jumlah pemuda yang berwirausaha
		Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah gelandang/balai remaja di Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$
	Per 1.000 penduduk	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jumlah penduduk	
Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan antar-sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW	Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RTRR	Dok	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana Penataan Ruang
	Ketersediaan Perda RTRW	Ada/tidak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IMB yang diterbitkan
	Prosentase layanan IMB	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Jumlah permohonan izin yang persyaratannya dinyatakan lengkap}}{\text{Realisasi RT RW}} \times 100$
	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Realisasi RT RW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$
				$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100$
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan seluruhnya}} \times 100$
	Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Panjang jalan yang memenuhi kriteria keselamatan}}{\text{Panjang jalan yang menghitungkan Pusat Kegiatan}} \times 100$
	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. (SPM)	%	Dinas Pekerjaan Umum	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Terwujudnya peningkatan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan sanitasi dan permukiman	Tersedianya Jalan yang Menjamin Perijanaan Dapat dilakukan Sesuai dengan Kecepatan Rencana. (SPM)	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan}}{\text{Panjang jalan yang menghubungkan Pusat Kegiatan}} \times 100$
	Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat (SPM)	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{E \text{ Seluruh PK Panjang jalan memenuhi kriteria Kondisi Jalan}}{E \text{ akhir thn pencapaian SPM Panjang jalan penghubung PK}} \times 100$ $\frac{\text{Panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalam kondisi baik}} \times 100$
	Prosentase panjang jalan yang menghubungkan PL dan sub PPK dengan PPK dalam kondisi baik	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Angka Mobilitas yang Dargetkan pada Akhir Waktu Pencapaian SPM}}{\text{Angka Mobilitas yang Ditentukan}} \times 100$
	Tersedianya Jalan Yang Memudahkan Masyarakat Per Individu Melakukan Perjalanan (SPM)	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{E \text{ Seluruh PK Panjang jalan memenuhi kriteria keselamatan SPM}}{E \text{ akhir thn pencapaian SPM Panjang jalan penghubung PK}} \times 100$
	Tersedianya Jalan Yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota (SPM)	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang berakses air bersih PDAM}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang memiliki akses dan terlayani sistem jaringan dan pengelolaan air limbah}}{\text{Jumlah Masyarakat yang memiliki akses}} \times 100$
	Prosentase Rumah Tangga berakses air bersih perpipaan	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$
	Ketersediaan sistem jaringan dan pengelolaan air limbah (SPM)	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang berakses air bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$
	Rumah tangga pengguna listrik	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang berakses air bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$
	Rumah tangga pengguna air bersih	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$
	Prosentase rumah tinggal bersantiasi	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang bersantiasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$
	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	Kantor Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m}^3\text{)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$
Prosentase penanganan sampah	%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$	
Rasio tempat pemukiman per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung tempat pemukiman umum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000$	
Rumah layak huni	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100$	
Lingkungan permukiman kumuh	%	Dinas Pekerjaan Umum	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100$	
Meningkatnya sistem transportasi perkotaan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Panjang jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}}$	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika	Rata-rata halte per trayek		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Halte Jumlah trayek
	Prosentase pemasangan Rambu-rambu	%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia $\times 100$
	Jumlah terminal/bandara	Buah	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
	Rasio jjin trayek		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Jumlah jjin trayek yang dikeluarkan Jumlah penduduk
	Jumlah uji kir angkutan umum		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
	Prosentase rumah tangga pengguna internet	%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Jumlah rumah tangga pengguna internet $\times 100$ Jumlah rumah tangga
	Jumlah lokasi layanan publik internet yang dapat diakses oleh publik		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
	Prosentase pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (SPM)	%	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah seluruh pengaduan
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yg telah diawasi Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL $\times 100$
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (SPM)	%	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air $\times 100$ Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
Prosentase status mutu air yang tercemar berat		Kantor Lingkungan Hidup		
- sungai		Kantor Lingkungan Hidup		
- air tanah		Kantor Lingkungan Hidup		
Emisi carbon dioxida (CO2) (MDC's)	Per 1.000 penduduk	Kantor Lingkungan Hidup	Bangka CO2 di daerah $\times 1.000$ Jumlah penduduk	
Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (SPM)	%	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi L	
Tingkat ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup (informasi status mutu air, udara)	%	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah jenis data informasi lingkungan hidup yang tersedia Jumlah jenis data informasi lingkungan hidup yang seharusnya ada $\times 100$	
Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (SPM)	%	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah Luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan Jumlah Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa $\times 100$	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (SPM)	%	Kantor Lingkungan Hidup/Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Jumlah Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun Jumlah Luas Wilayah
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Luas total hutan dan lahan kritis $\times 100$
	Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH) (MDG's)	%	Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	Luas lahan yang tertutup hutan (ha) Luas wilayah daratan (ha) $\times 100$
	Kerusakan Kawasan Hutan	%	Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	Luas Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan $\times 100$
	Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas wilayah. (MDG's)	%	Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	Jumlah luas kawasan hutan lindung dan hutan konservasi (ha) Luas wilayah daratan (ha) $\times 100$
	Cakupan bina kelompok perhutanan	%	Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan	Jumlah kelompok perhutanan yang dibina Jumlah kelompok perhutanan $\times 100$
	Tersedianya dokumen perencanaan RPPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RPPD yang tersedia Jumlah Dokumen RPPD yang seharusnya ada $\times 100$
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPPMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RPPMD yang tersedia Jumlah Dokumen RPPMD yang seharusnya ada $\times 100$
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RPPD yang tersedia Jumlah Dokumen RPPD yang seharusnya ada $\times 100$
	Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah prioritas bidang pembangunan daerah Jumlah prioritas bidang pembangunan daerah yang sinkron dengan prioritas pembangunan nasional $\times 100$
Penjabaran Program RPPMD kedalam RPPD	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah program RPPMD tahun ke-n yang diakomodir dalam RPPD Jumlah program RPPMD tahun ke-n $\times 100$	
Penjabaran Program RPPD kedalam APBD	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah program RPPD tahun ke-n yang diakomodir dalam APBD Jumlah program RPPD tahun ke-n $\times 100$	
Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	Seluruh SKPD	kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran $\times 100$	
Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	Seluruh SKPD	Jumlah seluruh aset sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah aset sarana dan prasarana aparatur yang tercatat $\times 100$	
Prosentase SKPD yang dibina untuk pengeloaan keuangan daerah	%	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	SKPD yang dibina untuk pengelolaan keuangan daerah Jumlah Seluruh SKPD $\times 100$	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Prosentase Raperda yang ditetapkan	%	Sekretariat DPRD	$\frac{\text{Jumlah Raperda yang dibahas dan disetujui menjadi Perda}}{\text{Jumlah Raperda yang dibahas bersama DPRD}} \times 100$
	Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan pihak swasta yang ditindaklanjuti dengan program	%	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah kerjasama dengan pemda lainnya dan swasta yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kerjasama dengan pemda lainnya dan swasta}} \times 100$
	SKPD yang menetapkan SOP	%	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menetapkan SOP/SPP}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100$
	Pengelolaan arsip secara baku	%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100$
	Temuan Pengawas yang ditindak lanjuti	%	Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan Pengawas eksternal dan internal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan pengawas eksternal dan internal}} \times 100$
	Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	%	Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah unsur SPIP yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah unsur SPIP sesuai peraturan perundang-undangan}} \times 100$
	Prosentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	%	Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat ke APIP}} \times 100$
	Rasio aparatur berdasarkan pendidikan	%	Badan Kepegawaian Daerah	$\frac{\text{Jumlah Aparatur dengan pendidikan terakhir S1}}{\text{Jumlah Aparatur}} \times 100$
	- S1	%	Badan Kepegawaian Daerah	$\frac{\text{Jumlah Aparatur dengan pendidikan terakhir S2}}{\text{Jumlah Aparatur}} \times 100$
	- S2	%	Badan Kepegawaian Daerah	$\frac{\text{Jumlah Aparatur dengan pendidikan terakhir S3}}{\text{Jumlah Aparatur}} \times 100$
- S3	%	Badan Kepegawaian Daerah	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi}}{\text{Jumlah jabatan struktural dipenda}} \times 100$	
Prosentase jumlah jabatan terisi	%	Badan Kepegawaian Daerah	$\frac{\text{Jumlah jabatan struktural yang terisi}}{\text{Jumlah jabatan struktural}} \times 100$	
Prosentase jumlah jabatan terisi	%	Badan Kepegawaian Daerah / Seluruh SKPD	$\frac{\text{Jumlah aparat yang tidak mendapatkan hukuman disiplin}}{\text{Jumlah aparat}} \times 100$	
Tingkat disiplin aparatur	%	Badan Kepegawaian Daerah / Seluruh SKPD	$\frac{\text{Jumlah aparat yang lulus mengikuti diklat teknis}}{\text{Jumlah aparat}} \times 100$	
Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi	%	Badan Pendidikan dan Pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparat yang mengikuti diklat teknis kompetensi}}{\text{Jumlah aparat}} \times 100$	
Prosentase pejabat struktural yang memenuhi persyaratan diklat PIM	%	Badan Pendidikan dan Pelatihan	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat PIM}}{\text{Jumlah pejabat struktural}} \times 100$	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan Perda APBD tepat Waktu		Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
	Prosentase anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah	%	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	$\frac{\text{Jumlah total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur}}{\text{Jumlah total belanja daerah}} \times 100$
	Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	%	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$
	Tingkat pertumbuhan PAD	%	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun (n)} - \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun (n-1)}}{\text{Pendapatan Asli Daerah tahun (n-1)}} \times 100$
	Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah	%	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	$\frac{\text{Jumlah Total Belanja Modal Daerah}}{\text{Jumlah Total Belanja Daerah}} \times 100$
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah KK yang di terbitkan pada tahun (n)}}{\text{Jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (n)}} \times 100$
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Wajib KTP Elektronik pada tahun (n)}} \times 100$
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun (n)}}{\text{Jumlah kelahiran yang terjadi dengan tahun (n)}} \times 100$
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun (n)}}{\text{Jumlah kematian yang terjadi dengan tahun (n)}} \times 100$
Meningkatnya pelayanan umum, komunikasi dan informasi	Ketersediaan data base kependudukan tahun berkenaan	Ada/tidak	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Menunjukkan ketersediaan database kependudukan tahun (n)
	Jumlah media informasi yang menggunakan teknologi IT		Sekretariat Daerah	Menunjukkan jumlah media informasi/aplikasi yang menggunakan teknologi IT
	Web site milik pemerintah daerah	Buah	Sekretariat Daerah	Menunjukkan jumlah website resmi milik pemerintah daerah
	Prosentase belanja untuk pengadaan barang/jasa yang dilelang secara SPSE	%	Sekretariat Daerah	$\frac{\text{Jumlah total belanja yang dilelang secara SPSE}}{\text{Jumlah total belanja untuk pengadaan barang/jasa}} \times 100$
	Prosentase penyelesaian kasus sengketa tanah	%	Sekretariat Daerah	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sengketa tanah}} \times 100$
Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani	%	Sekretariat Daerah	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}} \times 100$	

	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
Terciptanya ketentraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat	Angka Kriminalitas yang tertangani	Per 10.000 penduduk	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{jumlah penduduk}} \times 10.000$
	Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10.000$
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{\text{jumlah polisi pamong praja}}{\text{jumlah penduduk}} \times 10.000$
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{\text{jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{jumlah pelanggaran K3}} \times 100\%$
	Rasio Pos Siskamling per jumlah RT		Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{jumlah pos siskamling}}{\text{jumlah RT}}$
	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah
	Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	kegiatan	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kegiatan	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

 H. S.N PRAMA PUTRA SOHE